GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar : **Suara Pembaruan** **Tanggal** : **16 Februari 2007**

Subyek : **Reklamasi Pantai utara** **Hari** : **Jumat**

Halaman : **1**

Reklamasi Pantai Utara Jakarta Dikaji Ulang

Walhi Jakarta mengingatkan Pemprov DKI agar tidak melanjutkan rencana mereklamasi pantai utara. Bencana banjir yang baru saja melanda warga Jakarta, tidak bisa diatasi dengan konsep reklamasi pantai.

[JAKARTA] Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mengkaji ulang konsep reklamasi pantai utara wilayah Jakarta. Upaya tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk penanganan pascabanjir yang sempat menggenangi sebagian besar wilayah Ibukota.

Menurut Wakil Gubernur DKI Fauzi Bowo, Pemprov akan bertemu dengan pihak terkait untuk membahas rencana reklamasi itu. "Selama ini orang selalu memperhatikan air yang datang dari hulu. Padahal ketinggian air di hilir ternyata mengalami peningkatan. Oleh karena itu, reklamasi pantai mendesak dilakukan," katanya seusai membuka Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) IV/2007 Kadin DKI Jakarta, di Ancol, Kamis (15/2).

Kemarin, dia menerima tamu yang terdiri dari pejabat DKI, konsultan dan pengusaha yang telah membangun reklamasi di Jakarta. Agenda pertemuan itu membahas hal tersebut.

Setidaknya ada empat kawasan reklamasi di Jakarta. Kawasan tersebut, yakni perluasan pelabuhan di Koja, tempat rekreasi Ancol, kawasan permukiman elite Pantai Mutiara dan Pantai Indah Kapuk.

Adanya reklamasi tersebut juga mengundang tanya dari kalangan aktivis lingkungan, di antaranya Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta. Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Slamet Daroyni kepada *Pembaruan,* di Jakarta, Jumat (16/2), mengingatkan Pemprov DKI agar tidak melanjutkan rencana mereklamasi pantai utara. Bencana banjir yang baru saja melanda warga Jakarta, tuturnya, tidak bisa diatasi dengan konsep reklamasi pantai.

Slamet mengkritik Pemprov DKI tidak peka bahkan cenderung mengabaikan proses hukum masalah reklamasi pantai utara, termasuk Jakarta. Kasus reklamasi yang masih diproses oleh Mahkamah Agung (MA) seharusnya dihormati Pemprov DKI dengan tidak membiarkan aktivitas pengurukan pantai oleh para pengusaha.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Dia mengingatkan, kasus Teluk Jakarta hingga kini masih dalam sengketa di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sengketa ini melibatkan pemerintah (Menteri Lingkungan Hidup) yang digugat oleh enam pihak perusahaan pengembang area reklamasi tersebut. Walhi, lanjutnya, bersama organisasi lingkungan hidup lainnya, juga melakukan gugatan intervensi terhadap perkara tersebut.

Perkara itu, lanjut Slamet, belum diputus oleh MA, sehingga belum ada putusan mengenai apakah izin untuk membangun di kawasan itu diperbolehkan atau tidak. Karena itu, selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, mestinya para pihak tidak melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap objek yang disengketakan. Upaya menjual dan mengalihkan hak atas obyek sengketa berarti tidak menghormati proses hukum.

Ketidaksatuan Pandangan

Reklamasi yang masih berlangsung di Jakarta, menurut dia, menunjukkan ketidaksatuan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah. Padahal tujuan dari proses hukum tersebut agar kerusakan lingkungan tidak semakin parah.

Fakta di lapangan juga memperlihatkan reklamasi yang sudah dilakukan tidak memecahkan persoalan lingkungan, khususnya upaya mengatasi banjir. "Di daerah hasil reklamasi memang tidak banjir. Tapi kawasan sekitarnya tergenang air," tukasnya.

Selain itu, katanya mengingatkan, pengambilan bahan uruk untuk reklamasi akan menghancurkan ekosistem kawasan penyangga Jakarta karena dibutuhkan 330 juta meter kubik bahan uruk dari darat dan laut. Di laut akan diambil pasir dari Kepulauan Seribu (Pulau Tanjung Burung, Pulau Burung, Tanjung Kait, Tanjung Pontang, Pantai Cemara dan Pasir Putih).

Sedangkan bahan uruk dari luar Jakarta akan mengambil dari pantai utara Banten, pantai barat Jabar dan pantai utara Jawa Barat bagian timur dan pasir bekas letusan gunung Krakatau di Lampung.

Padahal, daerah-daerah tersebut merupakan kawasan konservasi dan pariwisata. "Kawasan tersebut harus dijaga kelestariannya karena sangat mendukung keberlangsungan ekosistem dan merupakan sumber penghidupan dan kehidupan masyarakat sekitar. Pasir juga akan diambil dari bukit Parung dan Jonggol, yang artinya akan mengundulkan kawasan tersebut, yang pada akhirnya kembali menyebabkan banjir di Jakarta," paparnya.

Dia mengusulkan kepada Pemprov sebaiknya membenahi sungai-sungai, membangun kembali hutan kota dan memperluas daerah resapan air untuk mengatasi masalah lingkungan. [P-11/W-5]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup